



BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR: 100.3.3.2/880/BUP-PASBAR/2023

TENTANG
PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021-2026

BUPATI PASAMAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Gubernur/Bupati/Walikota wajib menetapkan indikator kinerja utama untuk Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) serta Unit Kerja Mandiri di bawahnya;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026, maka perlu menetapkan perubahan indikator kinerja utama perangkat daerah tahun 2021-2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Indikator Kinerja Utama Daerah Dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/ 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021 Nomor 2);
11. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Perubahan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertujuan untuk:
1. memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja perangkat daerah secara baik; dan

2. memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.
- KETIGA : Perubahan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.
- KEEMPAT : Perubahan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan oleh Organisasi Perangkat Daerah untuk:
1. menetapkan Rencana Kinerja Tahunan;
 2. menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran;
 3. menyusun Dokumen Penetapan Kinerja;
 4. menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja; dan
 5. melakukan evaluasi pencapaian kinerja berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026 yang disesuaikan dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang disusun setiap tahun.
- KEMPAT : Kepala perangkat daerah bertanggung jawab melakukan pengukuran, pengumpulan, dan pelaporan data kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU keputusan ini.
- KELIMA : Pembinaan atas pelaksanaan Keputusan Bupati ini dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pasaman Barat dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
- KEENAM : Pengawasan atas pelaksanaan Keputusan Bupati ini dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Simpang Empat
pada tanggal 31 Oktober 2023

BUPATI PASAMAN BARAT,



HAMSUARDI

Lampiran : Keputusan Bupati Paaman Barat
 Nomor : 100.3.3.2/880/BUP-PASBAR/2023
 Tanggal : 31 Oktober 2023
 Tentang : Perubahan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2021-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026

1. DINAS PENDIDIKAN

NO.	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1.	Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat yang berdaya saing	Angka Rata - rata Lama Sekolah	Nilai Perhitungan RLS	BPS
		Rata - rata Harapan Lama Sekolah	Nilai perhitungan HLS	BPS
	1.1 Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat yang berdaya saing	Angka Melek Huruf	$\frac{\text{Jumlah penduduk (usia diatas 15 tahun) yang bisa tulis baca pada tahun t}}{\text{Jumlah Penduduk usia 5-6 Tahun}} \times 100\%$	Dinas Pendidikan
		Angka Partisipasi PAUD	$\frac{\text{Jumlah anak didik PAUD 5-6 Tahun yang terdaftar dari PAUD}}{\text{Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas}} \times 100\%$	Dinas Pendidikan
		Angka Partisipasi Sekolah SD/MI	$\frac{\text{Jumlah anak usia 7-12 th yang bersekolah}}{\text{jumlah penduduk usia 7-12 th}} \times 100\%$	Dinas Pendidikan
		Angka Partisipasi SMP/ MTs	$\frac{\text{Jumlah anak usia 13-15 th yang bersekolah}}{\text{jumlah penduduk usia 13-15 th x 100}} \times 100\%$	Dinas Pendidikan
		Rasio Penduduk Usia Sekolah Yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan/atau Menengah yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan	$\frac{\text{Jumlah Penduduk Usia Sekolah Yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan atau Menengah yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan}}{\text{Jumlah Penduduk Usia Sekolah Yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan atau Menengah}} \times 100\%$	Dinas Pendidikan
2.	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil perhitungan survey	Disdik/ Bagian Organisasi
		Level Maturitas SPIP	Hasil Penilaian BPKP/ Inspektorat	BPKP/ Inspektorat
		Nilai SAKIP	Nilai berdasarkan LHE SAKIP OPD	Inspektorat

	2.1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil perhitungan survey	Disdik/ Bag. Organisasi
		Level Maturitas SPIP	Hasil Penilaian BPKP/ Inspektorat	BPKP/ Inspektorat
		Nilai SAKIP	Nilai berdasarkan LHE SAKIP OPD	Inspektorat
		Persentase penurunan temuan BPK dan/ atau Inspektorat	$\frac{\text{Jumlah Temuan BPK dan/atau Inspektorat Tahun } n - \text{Jumlah temuan BPK dan/ atau Inspektorat tahun } n-1}{\text{Jumlah temuan BPK dan/ atau Inspektorat Th } n-1} \times 100\%$	OPD/ BPK dan/ atau Inspektorat

2. DINAS KESEHATAN

NO.	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1.	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur	BPS
		Prevalensi Stunting	$\frac{\text{Jumlah balita pendek dan sangat pendek}}{\text{jumlah balita yang diukur panjang/tinggi badan}} \times 100\%$	Dinas Kesehatan/ Kementerian Kesehatan
	1.1 Meningkatnya pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat	Akreditasi RS	Hasil Akreditasi KARS	KARS/ Kementerian Kesehatan
		Angka Kematian Bayi (AKB)	$\frac{\text{Jumlah kematian bayi usia dibawah satu tahun pada Tahun } n}{\text{Jumlah kelahiran hidup pada tahun } n} \times 1000$	Dinas Kesehatan
		Angka Kematian Ibu (AKI)	$\frac{\text{Jumlah ibu hamil meninggal karena hamil,bersalin dan nifas pada Tahun } n}{\text{Jumlah kelahiran hidup pada tahun } n} \times 100.000$	Dinas Kesehatan
		Angka Kematian Balita (AKABA)	$\frac{\text{Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 5 tahun) pada Tahun } n}{\text{Jumlah kelahiran hidup pada tahun } n} \times 1000$	Dinas Kesehatan
		Cakupan Kepesertaan JKN	$\frac{\text{Jumlah penduduk yang mendapat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)}}{\text{jumlah penduduk seluruhnya pada periode yang sama}} \times 100$	Dinas Kesehatan
		Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	Capaian kumulatif dari seluruh capaian indikator SPM (dinyatakan dalam persen)	Dinas Kesehatan

		Prevalensi Stunting	$\frac{\text{Jumlah balita pendek dan sangat pendek}}{\text{jumlah balita yang diukur panjang/tinggi badan}} \times 100\%$	Dinas Kesehatan/ Kementerian Kesehatan
		Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	$\frac{\text{Jumlah tempat tidur pada fasilitas kesehatan rujukan}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 1000$	Dinas Kesehatan
	1.2 Meningkatnya peran serta masyarakat dalam Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Persentase Rumah Tangga ber PHBS (%)	$\frac{\text{Jumlah Rumah Tangga ber-PHBS}}{\text{Jumlah Seluruh Rumah Tangga}} \times 100\%$	Dinas Kesehatan
2.	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil perhitungan survey	Dinas Kesehatan
		Level Maturitas SPIP Dinas Kesehatan	Hasil Penilaian BPKP/ Inspektorat	BPKP/ Inspektorat
		Nilai SAKIP Dinas Kesehatan	Nilai berdasarkan LHE SAKIP OPD oleh Inspektorat	Inspektorat
	2.1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil perhitungan survey	Dinas Kesehatan/ Bagian Organisasi
		Level Maturitas SPIP Dinas Kesehatan	Hasil Penilaian BPKP/ Inspektorat	BPKP/ Inspektorat
		Nilai SAKIP Dinas Kesehatan	Nilai berdasarkan LHE SAKIP OPD oleh Inspektorat	Inspektorat
		Persentase penurunan temuan BPK dan/ atau Inspektorat	$\frac{\text{Jumlah Temuan BPK dan/atau Inspektorat Tahun n} - \text{Jumlah temuan BPK dan/ atau Inspektorat tahun n-1}}{\text{Jumlah temuan BPK dan/ atau Inspektorat Th n-1}} \times 100\%$	OPD/ BPK dan/ atau Inspektorat

3. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO.	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1.	Meningkatkan Pemenuhan Infrastruktur yang berkualitas dan Peningkatan Penataan Ruang Wilayah yang	Persentase Infrastruktur yang berkualitas	$\frac{\text{Jumlah Infrastruktur yang berkualitas}}{\text{Jumlah Infrastruktur Yang Tersedia}} \times 100\%$	DPUPR

	sesuai dengan Rencana Tata Ruang			
	1.1 Meningkatnya infrastruktur Publik yang sesuai standar	Persentase Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	$\frac{\text{Panjang drainase dalam kondisi baik}}{\text{panjang seluruh drainase di daerah Kabupaten}} \times 100\%$	DPUPR
		Persentase Irigasi Kabupaten dalam kondisi Baik	$\frac{\text{Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik}}{\text{Luas total drainase di daerah Kabupaten}} \times 100\%$	DPUPR
		Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap	$\frac{\text{Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik } (> 40 \text{ KM/Jam})}{\text{panjang jalan Kabupaten keseluruhan}} \times 100\%$	DPUPR
		Rasio Bangunan Gedung Pemerintah Yang Tertata Bangunan Lingkungannya	$\frac{\text{Jumlah Bangunan Gedung Pemerintah Yang Tertata Bangunan Lingkungannya}}{\text{Total Gedung Pemerintah}} \times 100\%$	DPUPR
		Rasio tenaga operator/teknis/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	$\frac{\text{Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis}}{\text{kebutuhan tenaga operator dan teknis/analisis}} \times 100\%$	DPUPR
	1.2 Terkendalinya pemanfaatan ruang sesuai RTRW	% bangunan ber- IMB per satuan bangunan	$\frac{\text{Jumlah bangunan ber - IMB}}{\text{jumlah bangunan}} \times 100\%$	DPUPR
		Ketaatan RTRW	$\frac{\text{Realisasi RTRW}}{\text{Rencana Peruntukan}} \times 100\%$	DPUPR
2.	Meningkatkan Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Persentase Prasarana Dasar yang tersedia	$\frac{\text{Jumlah prasarana dasar yang tersedia}}{\text{Jumlah kebutuhan prasarana dasar}} \times 100\%$	DPUPR
	3.1 Terpenuhiya infrastruktur dasar air minum dan sanitasi	Cakupan penduduk yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	$\frac{\text{Jumlah penduduk yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik}}{\text{jumlah penduduk}} \times 100\%$	DPUPR
		Jangkauan wilayah (kecamatan) dalam pengangkutan sampah	Jumlah kecamatan dalam jangkauan pengangkutan sampah	DPUPR
		Persentase penduduk yang mendapat akses air minum	$\frac{\text{Jumlah penduduk yang mendapat akses air minum}}{\text{jumlah penduduk}} \times 100\%$	DPUPR
3.		Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil perhitungan survey	DPUPR/ Bagian Organisasi

	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Level Maturitas SPIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Hasil Penilaian BPKP/ Inspektorat	BPKP/ Inspektorat
		Nilai SAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Nilai berdasarkan LHE SAKIP OPD oleh Inspektorat	Inspektorat
	3.1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil perhitungan survey	DPUPR/ Bagian Organisasi
		Level Maturitas SPIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Hasil Penilaian BPKP/ Inspektorat	BPKP/ Inspektorat
		Nilai SAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Nilai berdasarkan LHE SAKIP OPD oleh Inspektorat	Inspektorat
		Persentase penurunan temuan BPK dan/ atau Inspektorat	Jumlah Temuan BPK dan/atau Inspektorat Tahun n - Jumlah temuan BPK dan/ atau Inspektorat tahun n-1 -----x 100% Jumlah temuan BPK dan/ atau Inspektorat Th n-1	OPD/ BPK dan/ atau Inspektorat

4. DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN

NO.	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1.	Meningkatkan Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Berkualitas	$\frac{\text{Jumlah Perumahan dan Kawasan Permukiman yang berkualitas}}{\text{jumlah Perumahan dan Kawasan Permukima}} \times 100\%$	Dinas Perumahan dan Permukiman
	1.1 Meningkatnya Cakupan Layanan Program Pengembangan Perumahan guna Pemuenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dibidang Perumahan	Fasiliasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten yang dibangun}}{\text{jumlah kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat yang terdampak relokasi program pemerintah kabupaten}} \times 100\%$	Dinas Perumahan dan Permukiman
		Rasio penduduk korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	$\frac{\text{Jumlah penduduk korban bencana yang memperoleh rumah layak huni}}{\text{jJumlah penduduk korban bencana}} \times 100\%$	Dinas Perumahan dan Permukiman

	1.2 Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni dan Berkurangnya Luas Kawasan Kumuh	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	$\frac{\text{Jumlah rumah layak huni}}{\text{Jumlah seluruh rumah yang ada di wilayah Kabupaten}} \times 100\%$	Dinas Perumahan dan Permukiman
		Persentase areal kawasan kumuh	$\frac{\text{Luas Kawasan Kumuh}}{\text{Luas Wilayah}} \times 100\%$	Dinas Perumahan dan Permukiman
	1.3 Tersedianya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk menunjang fungsi hunian	Cakupan Lingkungan yang sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	$\frac{\text{Luasan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU}}{\text{Total luasan permukiman}} \times 100\%$	Dinas Perumahan dan Permukiman
		Persentase pengembang yang tersertifikasi	$\frac{\text{Jumlah pengembang yang tersertifikasi}}{\text{Total Jumlah Pengembang}} \times 100\%$	Dinas Perumahan dan Permukiman
2.	Fasilitasi Penanganan Konflik dan Sengketa Pertanahan	Persentase konflik pertanahan difasilitasi	$\frac{\text{Jumlah Konflik Pertanahan Yang Difasilitasi}}{\text{Jumlah Konflik Pertanahan}} \times 100\%$	Dinas Perumahan dan Permukiman
	2.1 Meningkatnya Penyelesaian Urusan Pertanahan	Jumlah Fasilitasi ganti rugi tanah	Angka Mutlak (Jumlah Fasilitasi ganti rugi tanah dalam satu tahun anggaran)	Dinas Perumahan dan Permukiman
		Penyelesaian izin lokasi (%)	$\frac{\text{Jumlah Izin Lokasi}}{\text{Jumlah Permohonan Izin Lokasi}} \times 100\%$	Dinas Perumahan dan Permukiman
3.	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Level Maturitas SPIP Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Hasil Penilaian BPKP/ Inspektorat	BPKP/ Inspektorat
		Nilai SAKIP Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Nilai berdasarkan LHE SAKIP OPD oleh Inspektorat	Inspektorat
	3.1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil perhitungan survey	Dinas Perkimtan/ Bagian Organisasi
		Level Maturitas SPIP Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Hasil Penilaian BPKP/ Inspektorat	BPKP/ Inspektorat
		Nilai SAKIP Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Nilai berdasarkan LHE SAKIP OPD oleh Inspektorat	Inspektorat

		Persentase penurunan temuan BPK dan/ atau Inspektorat	$\frac{\text{Jumlah Temuan BPK dan/atau Inspektorat Tahun n} - \text{Jumlah temuan BPK dan/ atau Inspektorat tahun n-1}}{\text{Jumlah temuan BPK dan/ atau Inspektorat Th n-1}} \times 100\%$	OPD/ BPK dan/ atau Inspektorat
--	--	---	---	--------------------------------

5. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN

NO.	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1.	Meningkatkan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah pengaduan yang terselesaikan}}{\text{Total Jumlah Pengaduan Pelanggaran yang diterima}} \times 100\%$	Satpol PP dan Kebakaran
	1.1 Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Ketertiban dan Ketentraman Umum serta Perlindungan Masyarakat	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	$\frac{\text{Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan}}{\text{jumlah keseluruhan Perda/Perkada yang memuat sanksi}} \times 100\%$	Satpol PP dan Kebakaran
		Rasio Penduduk yang Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum (Perda dan Perkada)	$\frac{\text{Jumlah penduduk yang memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum (Perda dan Perkada)}}{\text{jumlah penduduk yang terdampak Penegakan Hukum (Perda dan Perkada)}} \times 100\%$	Satpol PP dan Kebakaran
		Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	$\frac{\text{Jumlah pelanggaran K3 yang terselesaikan}}{\text{total pelanggaran K3}} \times 100\%$	Satpol PP dan Kebakaran
2.	Meningkatkan Pelayanan Kebakaran dan Non Kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Rata-rata waktu dari laporan diterima hingga mobil damkar tiba di tempat kejadian	Satpol PP dan Kebakaran
	2.1 Meningkatnya Kulaitas Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	$\frac{\text{Jumlah pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran}}{\text{jumlah kejadian kebakaran}} \times 100\%$	Satpol PP dan Kebakaran

	Kebakaran di Daerah	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Rata-rata waktu dari laporan diterima hingga mobil damkar tiba di tempat kejadian	Satpol PP dan Kebakaran
3.	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Satpol PP dan Kebakaran	Level Maturitas SPIP	Hasil Penilaian BPKP/ Inspektorat	BPKP/ Inspektorat
		Nilai SAKIP	Nilai berdasarkan LHE SAKIP OPD oleh Inspektorat	Inspektorat
	3.1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja Satpol PP dan Kebakaran	Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil perhitungan survey	Sapol PP dan Kebakaran/ Bagian Organisasi
		Level Maturitas SPIP	Hasil Penilaian BPKP/ Inspektorat	BPKP/ Inspektorat
		Nilai SAKIP	Nilai berdasarkan LHE SAKIP OPD oleh Inspektorat	Inspektorat
		Persentase penurunan temuan BPK dan/ atau Inspektorat	$\frac{\text{Jumlah Temuan BPK dan/atau Inspektorat Tahun } n - \text{Jumlah temuan BPK dan/ atau Inspektorat tahun } n-1}{\text{Jumlah temuan BPK dan/ atau Inspektorat Th } n-1} \times 100\%$	OPD/ BPK dan/ atau Inspektorat

6. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO.	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1.	Meningkatkan Pelayanan Kebencanaan di Kabupaten Pasaman Barat	Indeks Ketahanan Daerah	Nilai Indeks	BNPB
	1.1 Masyarakat yang tangguh menghadapi bencana	Rasio penduduk yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	$\frac{\text{Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana}}{\text{Jumlah warga negara di kawasan rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana}} \times 100\%$	BPBD
		Rasio penduduk yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	$\frac{\text{Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana}}{\text{jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana}} \times 100\%$	BPBD

		Rasio penduduk yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana -----x100% jumlah korban keseluruhan dari bencana	BPBD
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja BPBD	Level Maturitas SPIP BPBD	Hasil Penilaian BPKP/ Inspektorat	BPKP/ Inspektorat
		Nilai SAKIP BPBD	Nilai berdasarkan LHE SAKIP OPD oleh Inspektorat	Inspektorat
	2.1 Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil perhitungan survey	BPBD / Bagian Organisasi
		Level Maturitas SPIP BPBD	Hasil Penilaian BPKP/ Inspektorat	BPKP/ Inspektorat
		Nilai SAKIP BPBD	Nilai berdasarkan LHE SAKIP OPD oleh Inspektorat	Inspektorat
		Persentase penurunan temuan BPK dan/ atau Inspektorat	Jumlah Temuan BPK dan/atau Inspektorat Tahun n - Jumlah temuan BPK dan/ atau Inspektorat tahun n-1 -----x 100% Jumlah temuan BPK dan/ atau Inspektorat Th n-1	OPD/ BPK dan/ atau Inspektorat

7. DINAS SOSIAL

NO.	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1.	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan sosial	$\frac{\text{Jumlah PPKS yang memperoleh bantuan sosial}}{\text{Jumlah PPKS}} \times 100\%$	Dinas Sosial
	1.1 Meningkatkan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	Jumlah penyandang cacat Fisik dan Mental, lanjut usia yang tidak potensial yang menerima jaminan sosial -----x100% populasi penyandang cacat fisik mental dan lanjut usia	Dinas Sosial
		Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang	Jumlah Penyandang Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti -----x 100% Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis	Dinas Sosial

		terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti		
2.	Meningkatkan Penangan Korban bencana alam dan sosial	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kab / kota	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kab / kota -----x 100% Jumlah korban bencana alam dan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kab / kota	Dinas Sosial
	2.1 Meningkatnya Penanganan Korban bencana alam dan social	Persentase korban bencana alam dan social yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kab/kota	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran -----x100% Populasi korban alam dan sosial di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Dinas Sosial
3.	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Sosial	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) Dinas Sosial	Hasil perhitungan survey	OPD/ Bagian Organisasi
		Level Maturitas SPIP Dinas Sosial	Hasil Penilaian BPKP/ Inspektorat	BPKP/ Inspektorat
		Peningkatan Nilai SAKIP Dinas Sosial	Nilai berdasarkan LHE SAKIP OPD oleh Inspektorat	Inspektorat
	3.1 Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Sosial	Hasil perhitungan survey	OPD/ Bagian Organisasi
		Level Maturitas SPIP Dinas Sosial	Hasil Penilaian BPKP/ Inspektorat	BPKP/ Inspektorat
		Nilai SAKIP Dinas Sosial	Nilai berdasarkan LHE SAKIP Inspektorat	Inspektorat
		Persentase penurunan temuan BPK dan/ atau Inspektorat pada Dinas Sosial	Jumlah Temuan BPK dan/atau Inspektorat Tahun n - Jumlah temuan BPK dan/ atau Inspektorat tahun n-1 -----x 100% Jumlah temuan BPK dan/ atau Inspektorat Th n-1	OPD/ BPK dan/ atau Inspektorat

8. DINAS TENAGA KERJA

NO.	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Perluasan Kesempatan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	$\frac{\text{Jumlah Penganggur}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$	BPS

	1.1 Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	$\frac{\text{Jumlah pencari kerja yang ditempatkan}}{\text{jumlah pencari kerja yang terdaftar}} \times 100\%$	Dinas Tenaga Kerja
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	$\frac{\text{Jumlah Angkatan Kerja}}{\text{jumlah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas}} \times 100\%$	BPS
	1.2 Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja	Laju Pertumbuhan PDB Per Tenaga Kerja	$\frac{\text{PDRB per Tenaga Kerja Tahun } n - \text{PDRB per Tenaga Kerja Tahun } n-1}{\text{PDRB per Tenaga Kerja Tahun } n-1} \times 100\%$	Dinas Tenaga Kerja
		Persentase tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	$\frac{\text{Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan Berbasis Kompetensi}}{\text{Jumlah Tenaga Kerja}} \times 100\%$	Dinas Tenaga Kerja
	1.3 Meningkatnya Perlindungan Ketenagakerjaan	Jumlah tenaga kerja yang menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan	$\frac{\text{Jumlah tenaga kerja Yang Menjadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan}}{\text{Jumlah Tenaga Kerja}} \times 100\%$	Dinas Tenaga Kerja
		Persentase Perselisihan Hubungan Industrial Yang Diselesaikan Melalui Perjanjian Bersama Oleh Mediator Hubungan Industrial	$\frac{\text{Jumlah Kasus Perselisihan HI yang Terselesaikan dengan PB}}{\text{Jumlah Kasus HI Yang Dilaporkan}} \times 100\%$	Dinas Tenaga Kerja
2.	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat eks Transmigrasi	Jumlah Eks Transmigrasi yang difasilitasi program penguatan SDM	Jumlah Jorong Eks Transmigrasi yang difasilitasi program penguatan SDM (Angka Mutlak)	Dinas Tenaga Kerja
	2.1 Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Eks Transmigrasi	Jumlah Jorong Eks Transmigrasi Yang Difasilitasi Program Penguatan SDM	Jumlah Jorong Eks Transmigrasi yang difasilitasi program penguatan SDM (Angka Mutlak)	Dinas Tenaga Kerja
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Tata Kelola Dinas Tenaga Kerja	Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil perhitungan survey	OPD/ Bagian Organisasi
		Level Maturitas SPIP	Hasil Penilaian BPKP/ Inspektorat	BPKP/ Inspektorat
		Nilai SAKIP	Nilai berdasarkan LHE SAKIP OPD oleh Inspektorat	Inspektorat
	3.1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD dan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil perhitungan survey	OPD/ Bagian Organisasi
		Level Maturitas SPIP	Hasil Penilaian BPKP/ Inspektorat	BPKP/ Inspektorat
		Nilai SAKIP	Nilai berdasarkan LHE SAKIP OPD oleh Inspektorat	Inspektorat
		Persentase Penurunan Temuan BPK dan/atau Ispektorat	$\frac{\text{Jumlah Temuan BPK dan/atau Inspektorat Tahun } n - \text{Jumlah temuan BPK dan/ atau Inspektorat tahun } n-1}{\text{Jumlah temuan BPK dan/ atau Inspektorat Th } n-1} \times 100\%$	OPD/ BPK dan/ atau Inspektorat

9. DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO.	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1.	Meningkatkan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak serta Pemenuhan Hak Anak	IDG	IDG: $1/3 (Ipar+IDM+Lin-Dist)$ Ipar= indeks keterwakilan di parlemen IDM= indeks pengambilan keputusan Linc= indeks distribusi pendapatan	BPS
		IPG	IPG : $1/3 [Xede (1) + Xede (2) + Linc-Dist]$ Xede (1) = Xede untuk harapan hidup Xede(2) = Xede untuk pendidikan Linc-dist = Indeks distribusi pendapatan	BPS
		Predikat APE	Penilaian KLA oleh Kementerian	DPPKBP3A
		Predikat pencapaian KLA	Penilaian KLA oleh Kementerian	DPPKBP3A
	1.1 Terpenuhinya Hak Anak	Total Score Pemenuhan Hak Anak (Klaaster 1-5)	Penilaian KLA oleh Kementerian	DPPKBP3A
	1.2 Menurunnya Angka Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	Rasio Kekerasan Terhadap Anak	$\frac{\text{Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak Yang Dilaporkan}}{\text{Jumlah Anak (usia kurang dari 18 th)}} \times 10.000$	DPPKBP3A
		Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	$\frac{\text{Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan}}{\text{Jumlah Penduduk Perempuan}} \times 100.000$	DPPKBP3A
	1.3 Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Keterwakilan perempuan di lembaga legislatif	$\frac{\text{Jumlah Perempuan di Lembaga Legislatif Daerah}}{\text{Jumlah Anggota Legislatif Daerah}} \times 100\%$	
		Keterwakilan perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekutif	$\frac{\text{Jumlah Pekerja Perempuan di Lembaga Eksekutif}}{\text{Jumlah Pekerja Perempuan}} \times 100\%$	DPPKBP3A
		Persentase besaran anggaran responsive gender terhadap total anggaran Belanja Langsung APBD	$\frac{\text{Jumlah ARG (Melalui GAB dan GBS) pada Belanja Langsung}}{\text{Jumlah Total Belanja Langsung}} \times 100\%$	DPPKBP3A
2.	Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk	LPP	$r = \{(P_t / P_0) \times (1/t) - 1\} \times 100$ r = laju pertumbuhan penduduk Pt = Jumlah penduduk pada tahun t Po = Jumlah penduduk pada tahun dasar t = selisih tahun Pt dengan P0 Pt= Po + (B - D) + (Mi - Mo)	BPS/ BKKBN

			Pt = Jumlah penduduk pada tahun ke t Po = Jumlah penduduk pada tahun dasar (0) B (birth) = Jumlah kelahiran selama periode 0 - t D (death) = Jumlah Kematian selama periode 0 - t Mo = Jumlah migrasi keluar selama periode 0 - t Mi = Jumlah migrasi masuk selama periode 0 - t	
		TFR	$TFR = 5 \sum_{i=1}^7 ASFR_i$ $ASFR_i = \frac{bi}{pi} \times K$ TFR = Angka Kelahiran Total ASFR = Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur bi = Jumlah kelahiran dari perempuan pada kelompok umur i pada tahun tertentu pi = Jumlah penduduk perempuan kelompok umur i pada pertengahan tahun yang sama i = kelompok umur (i=1 untuk kelompok umur 15-19, i=2 untuk kelompok umur 20-24,....., i=7 untuk kelompok umur 45-49) K = bilangan kontanta biasanya 1000	BPS/ BKKBN
	2.1 Menurunnya angka Kelahiran pada WUS 15-19 Tahun	ASFR 15-19 Tahun	$\frac{\text{Jumlah Kelahiran pada Wanita Usia Subur 15-19 Tahun}}{\text{Jumlah Wanita Usia Subur 15-19 Tahun}} \times 100\%$	DPPKBP3A/ BPS/ BKKBN
	2.2 Meningkatnya Pemakaian Kontrasepsi Modern	mCPR	$\frac{\text{Jumlah peserta KB Aktif Modern}}{\text{Jumlah PUS}} \times 100\%$	DPPKBP3A
	2.3 Meningkatnya kualitas keluarga	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB)	$\frac{\text{Jumlah Anggota BKB}}{\text{Jumlah Keluarga Balita}} \times 100\%$	DPPKBP3A
3.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja DPPKBP3A	Level Maturitas SPIP	Hasil Penilaian BPKP/ Inspektorat	BPKP/ Inspektorat
		Nilai SAKIP	Nilai berdasarkan LHE SAKIP OPD oleh Inspektorat	Inspektorat
	3.1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DPPKBP3A	Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil perhitungan survey	OPD/ Bagian Organisasi
		Level Maturitas SPIP	Hasil Penilaian BPKP/ Inspektorat	BPKP/ Inspektorat
		Nilai SAKIP	Nilai berdasarkan LHE SAKIP OPD oleh Inspektorat	Inspektorat
		Persentase penurunan temuan BPK dan/ atau Inspektorat	$\frac{\text{Jumlah Temuan BPK dan/ atau Inspektorat Tahun } n - \text{Jumlah temuan BPK dan/ atau Inspektorat tahun } n-1}{\text{Jumlah temuan BPK dan/ atau Inspektorat Th } n-1} \times 100\%$	OPD/ BPK dan/ atau Inspektorat

10. DINAS KETAHANAN PANGAN

NO.	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1.	Peningkatan Kedaulatan pangan	Indeks Ketahanan Pangan	Nilai Indeks	Badan Ketahanan Pangan Nasional/ BPS
	1.1 Meningkatnya ketersediaan pangan	Persentase ketersediaan pangan utama	$\frac{\text{Jumlah cadangan pangan tersedia (kg)}}{\text{jumlah kebutuhan pangan (kg)}} \times 100\%$	Dinas Ketahanan Pangan
			$\frac{\text{Realisasi ketersediaan energi dan protein per kapita/hari}}{\text{ketersediaan energi dan protein per kapita/hari}} \times 100\%$	
	1.2 Meningkatnya Akses Informasi Harga dan Diversifikasi Konsumsi Pangan	Ketersediaan informasi harga pangan strategis	$\frac{\text{Kecamatan yang dipantau harga pangan pokok}}{\text{jumlah Kecamatan}} \times 100\%$	Dinas Ketahanan Pangan
		Persentase ketersediaan energi dan protein per kapita/hari	$\frac{\text{Realisasi ketersediaan energi dan protein per kapita/hari}}{\text{ketersediaan energi dan protein per kapita/hari}} \times 100\%$	BPS/DTPHP/Badan Ketahanan Pangan Nasional
		Skor pola pangan harapan (PPH) Konsumsi	% Angka Kecukupan Gizi (AKG) x bobot masing-masing kelompok pangan	BPS/DTPHP/Badan Ketahanan Pangan Nasional
	1.3 Meningkatnya Keamanan Pangan Segar	Jumlah Pelaku Usaha yang Dibina	Jumlah Pelaku Usaha yang Dibina (Angka mutlak)	Dinas Ketahanan Pangan
		Jumlah Pengambilan Sampel Pangan yang Beredar	Jumlah Pengambilan Sampel Pangan yang Beredar (Angka mutlak)	Dinas Ketahanan Pangan
3.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Ketahanan Pangan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil perhitungan survey	OPD/ Bagian Organisasi
		Level Maturitas SPIP Dinas Ketahanan Pangan	Hasil Penilaian BPKP/ Inspektorat	BPKP/ Inspektorat
		Peningkatan Nilai SAKIP Dinas Ketahanan Pangan	Nilai berdasarkan LHE SAKIP OPD	Inspektorat
	3.1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Ketahanan Pangan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil perhitungan survey	OPD/ Bagian Organisasi
		Level Maturitas SPIP Dinas Ketahanan Pangan	Hasil Penilaian BPKP/ Inspektorat	BPKP/ Inspektorat
		Peningkatan Nilai SAKIP Dinas Ketahanan Pangan	Nilai berdasarkan LHE SAKIP OPD oleh Inspektorat	Inspektorat
		Persentase Penurunan Temuan BPK dan atau Inspektorat	$\frac{\text{Jumlah Temuan BPK dan/atau Inspektorat Tahun n} - \text{Jumlah temuan BPK dan/ atau Inspektorat tahun n-1}}{\text{Jumlah temuan BPK dan/ atau Inspektorat Th n-1}} \times 100\%$	OPD/ BPK dan/ atau Inspektorat

11. DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO.	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1.	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Hasil Penghitungan IKLH	Dinas Lingkungan Hidup
	1.1 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	$Nilai\ relatif = \frac{C_i}{L_{ij}}$ Rumus metode IP: $IP = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})^2_{Rate-rate} + (C_i/L_{ij})^2_{Maksimum}}{2}}$ $0 \leq PI_j \leq 1,0 \rightarrow$ baik (memenuhi baku mutu) $1,0 < PI_j \leq 5,0 \rightarrow$ cemar ringan $5,0 < PI_j \leq 10,0 \rightarrow$ cemar sedang $PI_j > 10,0 \rightarrow$ cemar berat	Dinas Lingkungan Hidup/ KLHK
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	$IKTL = 100 - ((84,3 - (TH \times 100)) \times \frac{50}{54,3})$ dimana: IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan TH = Tutupan Hutan	Dinas Lingkungan Hidup/ KLHK
		Indeks Kualitas Udara	$IKU = 100 - [50/0.9 \times (Ieu - 0.1)]$	Dinas Lingkungan Hidup/ KLHK
	1.2 Kepatuhan/ ketaatan pelaku usaha	Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kab/Kota	Jumlah penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kab/Kota dibagi Jumlah penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dikali 100%	Dinas Lingkungan Hidup
2.	Mewujudkan Pasaman Barat yang bersih dari sampah	Persentase pengurangan sampah	$\frac{\text{Timbulan sampah tahun } n - \text{Timbulan sampah tahun } n-1}{\text{Timbulan sampah tahun } n-1} \times 100\%$	Dinas Lingkungan Hidup
	2.1 Optimalisasi Kinerja Pengelolaan Persampahan	Cakupan wilayah kecamatan yang dilayani dalam pengangkutan sampah ke TPA	Kecamatan yang dilayani dalam pengangkutan sampah ke TPA (Angka mutlak)	Dinas Lingkungan Hidup
		Persentase jumlah Sampah yang tertangani	$\frac{\text{Volume sampah yang ditangani}}{\text{Volume produksi sampah}} \times 100\%$	Bidang Kebersihan dan Pertamanan

3.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja DLH	Level maturitas SPIP	Hasil Penilaian BPKP/ Inspektorat	BPKP/ Inspektorat
		Peningkatan nilai SAKIP DLH	Nilai berdasarkan LHE SAKIP OPD	Inspektorat
	3.1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup	Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil perhitungan survey	OPD/ Bagian Organisasi
		Level maturitas SPIP	Hasil Penilaian BPKP/ Inspektorat	BPKP/ Inspektorat
		Nilai SAKIP DLH	Nilai berdasarkan LHE SAKIP OPD	Inspektorat
		Persentase penurunan temuan BPK dan/atau Inspektorat	Jumlah Temuan BPK dan/atau Inspektorat Tahun n - Jumlah temuan BPK dan/ atau Inspektorat tahun n-1 -----x 100% Jumlah temuan BPK dan/ atau Inspektorat Th n-1	OPD/ BPK dan/ atau Inspektorat

12. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO.	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Adminduk dan Pencatatan Sipil yang Profesional, Akuntabel, dan Inovatif	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	Jumlah kepemilikan penduduk yang memiliki dokumen pencatatan sipil -----x 100% Jumlah Penduduk	Disdukcapil
		Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	Jumlah kepemilikan penduduk yang memiliki dokumen pendaftaran penduduk -----x 100% Jumlah Penduduk	Disdukcapil
	1.1 Terwujudnya Pendaftaran Penduduk secara Optimal	% Kepemilikan KIA	Jumlah Penduduk berumur 17 tahun ke bawah yang memiliki KTP -----x 100% Jumlah penduduk 17 tahun ke bawah	Disdukcapil
		% Penduduk Usia > 18 Tahun yang Memiliki KTP	Jumlah Penduduk berumur 18 tahun ke atas yang memiliki KTP ----- x 100% Jumlah penduduk 18 tahun ke atas	Disdukcapil
		% Penduduk yang Memiliki KK	Jumlah Keluarga yang memiliki KK ----- x 100% Jumlah Keluarga	Disdukcapil

	1.2 Terwujudnya Pencatatan Sipil secara Optimal	% Penduduk Usia < 18 yang Mempunyai Akte Kelahiran	Jumlah penduduk usia < 18 Tahun yang mempunyai akte kelahiran ----- x 100% Jumlah penduduk usia < 18 Tahun	Disdukcapil
		% Penerbitan Akta Kematian	Jumlah Akta kematian yang diterbitkan ----- x 100% Jumlah kematian	Disdukcapil
		% Penerbitan Akta Perceraian	Jumlah Akta Perceraian yang diterbitkan ----- x 100% Jumlah perceraian	Disdukcapil
2.	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Disdukcapil	Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil perhitungan survey	OPD/ Bagian Organisasi
		Level Maturitas SPIP	Hasil Penilaian BPKP/ Inspektorat	BPKP/ Inspektorat
		Nilai SAKIP	Nilai berdasarkan LHE SAKIP Inspektorat	Inspektorat
	2.1 Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	% Penurunan Temuan BPK/Inspektorat	Jumlah Temuan BPK dan/atau Inspektorat Tahun n - Jumlah temuan BPK dan/ atau Inspektorat tahun n-1 -----x 100% Jumlah temuan BPK dan/ atau Inspektorat Th n-1	OPD/ BPK dan/ atau Inspektorat
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil perhitungan survey	OPD/ Bagian Organisasi
		Level Maturitas SPIP	Hasil Penilaian BPKP/ Inspektorat	BPKP/ Inspektorat
		Nilai SAKIP	Nilai berdasarkan LHE SAKIP OPD	Inspektorat

13. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI

NO.	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1.	Meningkatkan Keberdayaan Desa	Persentase Desa Tertinggal Menurut IDM	$\frac{\text{Jumlah Nagari Tertinggal Menurut IDM}}{\text{Jumlah Nagari}} \times 100\%$	DPMN/ Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi
		Persentase Status Desa Mandiri Menurut IDM	$\frac{\text{Jumlah Nagari Mandiri Menurut IDM}}{\text{Jumlah Nagari}} \times 100\%$	DPMN/ Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi
	1.1 Peningkatan status kemandirian Desa	Indeks Ketahanan Ekonomi Kabupaten	Nilai komposit IKE pada Perhitungan IDM	DPMN/ Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi
		Indeks Ketahanan Lingkungan/ Ekologi Kabupaten	Nilai Komposit IKL pada Perhitungan IDM	DPMN/ Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi

		Indeks Ketahanan Sosial Kabupaten	Nilai Komposit IKS pada Perhitungan IDM	DPMN/ Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi
2.	Meningkatkan Keberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	Rasio Lembaga Sosial, Lembaga Adat dan Lembaga Ekonomi aktif	Nilai Komposit Persentase Lembaga Sosial, Lembaga Adat dan Lembaga Ekonomi aktif	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari
3.	2.1 Meningkatnya Keberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Lembaga Adat Aktif di Nagari	$\frac{\text{Jumlah Lembaga Adat Aktif di Nagari}}{\text{Jumlah Lembaga Adat di Nagari}} \times 100\%$	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari
		Persentase Lembaga Ekonomi Aktif di Nagari	$\frac{\text{Jumlah Lembaga Ekonomi Aktif di Nagari}}{\text{Jumlah Lembaga Ekonomi di Nagari}} \times 100\%$	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari
		Persentase Lembaga Sosial Aktif di Nagari	$\frac{\text{Jumlah Lembaga Sosial Aktif di Nagari}}{\text{Jumlah Lembaga Sosial di Nagari}} \times 100\%$	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari
	3.1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil perhitungan survey	OPD/ Bagian Organisasi
		Level Maturitas SPIP	Hasil Penilaian BPKP/ Inspektorat	BPKP/ Inspektorat
		Nilai SAKIP	Nilai berdasarkan LHE SAKIP OPD	Inspektorat
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil perhitungan survey	OPD/ Bagian Organisasi
		Level Maturitas SPIP	Hasil Penilaian BPKP/ Inspektorat	BPKP/ Inspektorat
		Nilai SAKIP	Nilai berdasarkan LHE SAKIP OPD	Inspektorat
		Persentase penurunan temuan BPK dan/ atau Inspektorat	$\frac{\text{Jumlah Temuan BPK dan/atau Inspektorat Tahun } n - \text{Jumlah temuan BPK dan/ atau Inspektorat tahun } n-1}{\text{Jumlah temuan BPK dan/ atau Inspektorat Th } n-1} \times 100\%$	OPD/ BPK dan/ atau Inspektorat

14. DINAS PERHUBUNGAN

NO.	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1.	Menyelenggarakan Sistem Pelayanan Transportasi Yang dapat mengembangkan konektivitas wilayah	Rasio Konektifitas Kabupaten	Rasio Konektifitas Kabupaten = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2x bobot angkutan Sungai, danau dan penyeberangan) - IK1 (angkutan jalan) = (Jumlah trayek yg dilayani pd kabupaten/kota x bobot trayek) dibagi jumlah kebutuhan trayek pada kabupaten/kota tersebut) - IK2 (Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan)= jumlah lintas Penyeberangan yang beroperasi pd	Dinas Perhubungan

			kabupaten/kota tsb x bobot lintas) dibagi (jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada kabupaten/kota tersebut)	
	1.1 Meningkatnya konektifitas angkutan umum dan konektifitas jalan	Persentase layanan angkutan darat	$\frac{\text{Jumlah angkutan darat}}{\text{Jumlah Penumpang Angkutan Darat}} \times 100\%$	Dinas Perhubungan
		V/C Ratio di Jalan Kab/Kota	$\frac{\text{Volume Jalan}}{\text{Kapasitas Jalan Yang Ada}} \times 100\%$	Dinas Perhubungan
2.	Meningkatkan akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan	Level Maturitas SPIP	Hasil Penilaian BPKP/ Inspektorat	BPKP/ Inspektorat
		Nilai SAKIP	Nilai berdasarkan LHE SAKIP OPD	Inspektorat
	2.1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan	% Penurunan Temuan BPK / Inspektorat	$\frac{\text{Jumlah Temuan BPK dan/atau Inspektorat Tahun n} - \text{Jumlah temuan BPK dan/ atau Inspektorat tahun n-1}}{\text{Jumlah temuan BPK dan/ atau Inspektorat Th n-1}} \times 100\%$	OPD/ BPK dan/ atau Inspektorat
		indeks kepuasan masyarakat	Hasil perhitungan survey	
		Level Maturitas SPIP	Hasil Penilaian BPKP/ Inspektorat	BPKP/ Inspektorat
		Nilai SAKIP	Nilai berdasarkan LHE SAKIP OPD	Inspektorat

15. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO.	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1.	Meningkatkan Pelayanan Informasi dan Teknologi yang Berkualitas	Indeks Maturitas SPBE	Nilai Indeks	KemenPAN-RB
	1.1 Meningkatkan Pelayanan aplikasi dan informatika	% Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	$\frac{\text{Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi}}{\text{Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan}} \times 100\%$	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	$\frac{\text{Jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\%$	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.	Meningkatkan Pelayanan Diseminasi Informasi Daerah	Cakupan Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik	$\frac{\text{Jumlah Layanan Informasi dan Komunikasi Publik Yang Diselenggarakan}}{\text{Jumlah Kebutuhan Layanan Informasi dan Komunikasi Publik}} \times 100\%$	Dinas Komunikasi dan Informatika

	2.1 Meningkatnya pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Kebijakan Pemerintah Daerah	Masyarakat yang menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Kab/Kota	Jumlah masyarakat yang menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Kab/Kota -----x100% Jumlah Penduduk	Dinas Komunikasi dan Informatika
3.	Terwujudnya Satu Data Indonesia Daerah Kabupaten Pasaman Barat	Nilai Capaian kemajuan penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS)	Nilai Capaian penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) dari BPS	BPS
	3.1 Meningkatnya penggunaan data statistik dalam Merumuskan Kebijakan Pemerintah Daerah	Persentase OPD yang menggunakan Data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan Daerah	Jumlah OPD yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah -----x 100% Jumlah OPD	Dinas Komunikasi dan Informatika
4.	Meningkatkan Keamanan Informasi Daerah	Indeks KAMI	Nilai Indeks	Dinas Komunikasi dan Informatika/ BSSN
	4.1 Meningkatnya Penerapan Keamanan Informasi Daerah	Cakupan pemenuhan asesmen dan evaluasi penerapan keamanan informasi daerah	$\frac{\text{Jumlah Nilai per Area Keamanan Informasi}}{\text{Jumlah Area Penilaian}} \times 100\%$	Dinas Komunikasi dan Informatika/ BSSN
5.	Mewujudkan tata kelola Pemerintah profesional, akuntabel & inovatif	Level Maturitas SPIP Dinas Komunikasi dan Informatika	Hasil Penilaian BPKP/ Inspektorat	BPKP/ Inspektorat
		Nilai SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika	Nilai berdasarkan LHE SAKIP OPD oleh Inspektorat	Inspektorat
	5.1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil perhitungan survey	OPD/ Bagian Organisasi
		Level Maturitas SPIP Dinas Komunikasi dan Informatika	Hasil Penilaian BPKP/ Inspektorat	BPKP/ Inspektorat
		Nilai SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika	Nilai berdasarkan LHE SAKIP OPD oleh Inspektorat	Inspektorat
		Persentase Penurunan temuan BPK dan/atau Inspektorat	Jumlah Temuan BPK dan/atau Inspektorat Tahun n - Jumlah temuan BPK dan/ atau Inspektorat tahun n-1 -----x 100% Jumlah temuan BPK dan/ atau Inspektorat Th n-1	OPD/ BPK dan/ atau Inspektorat

16. DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

NO.	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1.	Meningkatkan Koperasi yang Berkualitas	Persentase Koperasi Berkualitas	$\frac{\text{Jumlah koperasi berkualitas}}{\text{Jumlah Koperasi}} \times 100\%$	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	1.1 Meningkatnya Koperasi Aktif	Persentase Koperasi Aktif	$\frac{\text{Jumlah koperasi Aktif}}{\text{Jumlah Koperasi}} \times 100\%$	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	1.2 Meningkatnya Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil	Persentase Usaha Mikro Aktif	$\frac{\text{Jumlah Usaha Mikro Aktif}}{\text{Jumlah Usaha Mikro}} \times 100\%$	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Persentase Usaha Mikro menjadi Kecil	$\frac{\text{Jumlah Usaha Mikro Tahun n}-\text{Jumlah Usaha Mikro Tahun n-1}}{\text{Jumlah Usaha Mikro Tahun n-1}} \times 100\%$	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.	Meningkatkan Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan	Kenaikan PDRB Sektor Perdagangan	$\frac{\text{PDRB Sektor Perdagangan Tahun n}-\text{PDRB Sektor Perdagangan Tahun n-1}}{\text{PDRB Sektor Perdagangan Tahun n-1}} \times 100\%$	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2.1 Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	$\frac{\text{PDRB Sektor Perdagangan Tahun n}}{\text{PDRB Tahun n}} \times 100\%$	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Persentase alat - Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	$\frac{\text{Jumlah alat - Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku}}{\text{Jumlah alat - Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku dikali 100\%}} \times 100\%$	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3.	Meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor IKM, UKM	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Perindustrian	$\frac{\text{PDRB Sektor INdustri Tahun n}-\text{PDRB Sektor Industri Tahun n-1}}{\text{PDRB Sektor Industri Tahun n01}} \times 100\%$	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	3.1 Meningkatnya IKM, UKM dan Ekonomi Kreatif	Kontribusi PDRB dari Sektor Industri	$\frac{\text{PDRB Sektor INdustri Tahun n}}{\text{PDRB Tahun n}} \times 100\%$	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha Industri Menengah yang dikeluarkan oleh Instansi terkait	Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha Industri Menengah yang dikeluarkan oleh Instansi terkait	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Pertumbuhan Jumlah IKM	$\frac{\text{Jumlah IKM tahun n}-\text{Jumlah IKM Tahun n-1}}{\text{Jumlah IKM Tahun n-1}} \times 100\%$	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

4.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Level Maturitas SPIP Dinas Perdagangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Hasil Penilaian BPKP	BPKP
		Nilai SAKIP Dinas Perdagangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Nilai berdasarkan LHE SAKIP Inspektorat	Inspektorat
	4.1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil perhitungan survey	OPD/ Bagian Organisasi
		Level Maturitas SPIP DPKUKM	Hasil Penilaian BPKP	BPKP
		Nilai SAKIP Dinas Perdagangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Nilai berdasarkan LHE SAKIP Inspektorat	Inspektorat
		Persentase penurunan jumlah temuan BPK dan/atau Inspektorat	Jumlah Temuan BPK dan/atau Inspektorat Tahun n - Jumlah temuan BPK dan/ atau Inspektorat tahun n-1 -----x 100% Jumlah temuan BPK dan/ atau Inspektorat Th n-1	OPD/ BPK dan/ atau Inspektorat

17. DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO.	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1.	Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Berkualitas	Nilai IKM Perizinan	Nilai IKM, sesuai Permen-PAN-RB Nomor 14 Tahun 2017	DPMPTSP/ Bagian Organisasi
	1.1 Meningkatnya Pelayanan Perizinan Yang Berkualitas	Nilai IKM Perizinan	Nilai IKM, sesuai Permen-PAN-RB Nomor 14 Tahun 2017	DPMPTSP/ Bagian Organisasi
2.	Meningkatkan Investasi Di Daerah	Kenaikan Nilai Investasi Daerah	Nilai Investasi PMA/PMDN tahun n – Nilai Investasi PMA/PMDN th n-1 -----x100% Nilai Investasi PMA/PMDN th n-1	DPMPTSP
	2.1 Meningkatnya Nilai Investasi PMDN/PMA	Kenaikan Nilai Investasi PMDN/PMA	Nilai Investasi PMA/PMDN tahun n – Nilai Investasi PMA/PMDN th n-1 -----x100% Nilai Investasi PMA/PMDN th n-1	DPMPTSP
3.	Meningkatkan akuntablitas kinerja	Level Maturitas SPIP	Hasil Penilaian BPKP/ Inspektorat	BPKP/ Inspektorat
		Nilai SAKIP	Nilai berdasarkan LHE SAKIP OPD oleh Inspektorat	Inspektorat
		Level Maturitas SPIP	Hasil Penilaian BPKP/ Inspektorat	BPKP/ Inspektorat

	3.1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP	Nilai berdasarkan LHE SAKIP Inspektorat	Inspektorat
		Persentase penurunan jumlah temuan BPK	Jumlah Temuan BPK dan/atau Inspektorat Tahun n - Jumlah temuan BPK dan/ atau Inspektorat tahun n-1 -----x 100% Jumlah temuan BPK dan/ atau Inspektorat Th n-1	OPD/ BPK dan/ atau Inspektorat

18. DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

NO.	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1.	Meningkatkan Peran Serta Kepemudaan dalam Pembangunan	Jumlah pemuda yang aktif dalam organisasi sosial	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang aktif dalam organisasi sosial di kab/kota ----- x100% Jumlah pemuda (usia 16-30 tahun) di kab/kota	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
		Jumlah pemuda yang berwirausaha	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di kab/kota -----x100% Jumlah pemuda (usia 16-30 tahun) di kab/kota	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	1.1 Meningkatnya Peran Serta Pemuda dalam Kegiatan Sosial dan Kegiatan Ekonomi Mandiri	Jumlah pemuda yang aktif dalam organisasi sosial	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang aktif dalam organisasi sosial di kab/kota ----- x100% Jumlah pemuda (usia 16-30 tahun) di kab/kota	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
		Jumlah pemuda yang berwirausaha	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di kab/kota -----x100% Jumlah pemuda (usia 16-30 tahun) di kab/kota	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	2. Meningkatkan Prestasi Olahraga Daerah	Tingkat perolehan medali pada Event Olahraga Nasional dan Internasional	Jumlah perolehan mendali pada even olahraga pada tingkat nasional dan internasional	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	2.1 Meningkatnya Prestasi Olahraga Daerah	Jumlah perolehan mendali pada even olahraga pada tingkat nasional dan internasional	Jumlah perolehan mendali pada even olahraga pada tingkat nasional dan internasional	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
3.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Level Maturitas SPIP	Hasil Penilaian BPKP/ Inspektorat	BPKP/ Inspektorat
		Nilai SAKIP	Nilai berdasarkan LHE SAKIP OPD oleh Inspektorat	Inspektorat

	3.1 Terwujudnya Birokrasi yang Memiliki Pelayanan Public yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil perhitungan survey	OPD/ Bagian Organisasi
		Level Maturitas Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Hasil Penilaian BPKP/ Inspektorat	BPKP/ Inspektorat
		Nilai SAKIP Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Nilai berdasarkan LHE SAKIP OPD oleh Inspektorat	Inspektorat
		Persentase Penurunan Temuan BPK dan/ atau Inspektorat	Jumlah Temuan BPK dan/atau Inspektorat Tahun n - Jumlah temuan BPK dan/ atau Inspektorat tahun n-1 -----x 100% Jumlah temuan BPK dan/ atau Inspektorat Th n-1	OPD/ BPK dan/ atau Inspektorat

19. DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

NO.	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1.	Meningkatkan Pelayanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perpustakaan	Nilai IKM, sesuai Permen-PAN-RB Nomor 14 Tahun 2017	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan/ Bagian Organisasi
	1.1 Meningkatnya Minat Gemar Membaca Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan/ Perpusnas
		Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan/ Perpusnas
		Persentase Pertambahan Kunjungan Pemustaka	$\frac{\text{Jumlah Kunjungan tahun n}-\text{Jumlah Kunjungan Tahun n-1}}{\text{Jumlah Kunjungan Tahun n-1}} \times 100\%$	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.	Mewujudkan Pengelolaan Sistem Kearsipan pada Instansi Pemerintah di Semua Tingkatan	Nilai Laporan Audit Kearsipan Eksternal (LAKE)	Hasil penilaian LAKE	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	2.1 Meningkatnya pengelolaan sistem kearsipan pada Instansi pemerintah disemua tingkatan	Tingkat keberadaan arsip dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, pemerintahan pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Tingkat keberadaan arsip dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, pemerintahan pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

		Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
3.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Level Maturitas SPIP	Hasil Penilaian BPKP/ Inspektorat	BPKP/ Inspektorat
		Nilai SAKIP Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Nilai berdasarkan LHE SAKIP OPD oleh Inspektorat	Inspektorat
	3.1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Persentase penurunan temuan BPK dan/ atau Inspektorat	Jumlah Temuan BPK dan/atau Inspektorat Tahun n - Jumlah temuan BPK dan/ atau Inspektorat tahun n-1 -----x 100% Jumlah temuan BPK dan/ atau Inspektorat Th n-1	OPD/ BPK dan/ atau Inspektorat

20. DINAS PERIKANAN

NO.	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1.	Meningkatkan Pertumbuhan Perekonomian Sektor Perikanan	Persentase pertumbuhan PDRB sektor perikanan	Pertumbuhan PDRB sektor perikanan tahun n - pertumbuhan PDRB sektor perikanan tahun n-1 -----x100% Pertumbuhan PDRB sektor perikanan tahun n-1	Dinas Perikanan/ BPS
	1.1 Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Persentase produksi perikanan tangkap	$\frac{\text{Produksi perikanan tangkap tahun n} - \text{produksi perikanan tangkap th n-1}}{\text{Produksi perikanan tangkap tahun n-1}} \times 100\%$	Dinas Perikanan
	1.2 Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Persentase produksi perikanan budidaya	$\frac{\text{Produksi perikanan budidaya tahun n} - \text{produksi perikanan budidaya th n-1}}{\text{Produksi perikanan budidaya tahun n-1}} \times 100\%$	Dinas Perikanan
	1.3 Meningkatnya produksi ikan olahan	Jumlah Produksi Ikan Olahan	Jumlah Produksi Ikan Olahan	Dinas Perikanan
2.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perikanan	Level Maturitas SPIP Dinas Perikanan	Hasil Penilaian BPKP/ Inspektorat	BPKP/ Inspektorat
		Nilai Sakip Dinas Perikanan	Nilai berdasarkan LHE SAKIP OPD oleh Inspektorat	Inspektorat
	2.1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perikanan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil perhitungan survey	OPD/ Bagian Organisasi
		Level Maturitas SPIP Dinas Perikanan	Hasil Penilaian BPKP/ Inspektorat	BPKP/ Inspektorat
		Nilai Sakip Dinas Perikanan	Nilai berdasarkan LHE SAKIP OPD oleh Inspektorat	Inspektorat

		Persentase penurunan jumlah temuan BPK dan / atau Inspektorat	Jumlah Temuan BPK dan/atau Inspektorat Tahun n - Jumlah temuan BPK dan/ atau Inspektorat tahun n-1 -----x 100% Jumlah temuan BPK dan/ atau Inspektorat Th n-1	OPD/ BPK dan/ atau Inspektorat
--	--	---	---	--------------------------------

21. DINAS PARIWISATA

NO.	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1.	Meningkatkan pengamalan nilai adat, seni dan budaya dalam masyarakat	Cakupan lembaga adat, seni dan budaya yang dibina	$\frac{\text{Jumlah lembaga adat, seni dan budaya yang dibina}}{\text{Jumlah lembaga adat, seni dan budaya}} \times 100\%$	Dinas Pariwisata
	1.1 Meningkatnya peran nilai adat, seni dan budaya dalam masyarakat	Cakupan Lembaga adat seni dan budaya yang berperan aktif dalam masyarakat	$\frac{\text{Jumlah lembaga adat, seni dan budaya yang dibina}}{\text{Jumlah lembaga adat, seni dan budaya}} \times 100\%$	Dinas Pariwisata
2.	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata	Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB	$\frac{\text{Kontribusi PDRB ADHB dari Sektor Pariwisata}}{\text{Total nilai PDRB ADHB}} \times 100\%$	Dinas Pariwisata
	2.1 Meningkatnya penataan daya tarik destinasi wisata	Jumlah kunjungan wisatawan	Jumlah kunjungan wisatawan (Lokal dan Nusantara) di destinasi Wisata Pasaman Barat	Dinas Pariwisata
		Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PAD	$\frac{\text{Jumlah PAD Sektor Pariwisata (Retribusi masuk objek wisata, Pajak Hotel, Pajak Rumah Makan/Restoram)}}{\text{Jumlah Total PAD Kabupaten Pasaman Barat}} \times 100\%$	Dinas Pariwisata
	2.2 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	Persentase peningkatan pertumbuhan usaha Ekonomi Kreatif	$\frac{\text{Jumlah usaha sektor ekonomi kreatif th n} - \text{Jumlah usaha sektor ekonomi kreatif tahun n-1}}{\text{Jumlah sub sektor ekonomi kreatif th n-1}} \times 100\%$	Dinas Pariwisata
3.	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Pariwisa	Level Maturitas SPIP	Hasil Penilaian BPKP/ Inspektorat	BPKP/ Inspektorat
		Peningkatan Nilai Sakip	Nilai berdasarkan LHE SAKIP OPD oleh Inspektorat	Inspektorat
	3.1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pariwisata	Indeks Kepuasan Masyarakat (Pokdarwis, Penggiat wisata, Pelaku Ekraf)	Hasil perhitungan survey	OPD/ Bagian Organisasi
		Level Maturitas SPIP	Hasil Penilaian BPKP/ Inspektorat	BPKP/ Inspektorat
		Peningkatan nilai SAKIP	Nilai berdasarkan LHE SAKIP OPD oleh Inspektorat	Inspektorat

		Persentase Penurunan Temuan BPK dan / atau Inspektorat	Jumlah Temuan BPK dan/atau Inspektorat Tahun n - Jumlah temuan BPK dan/ atau Inspektorat tahun n-1 -----x 100% Jumlah temuan BPK dan/ atau Inspektorat Th n-1	OPD/ BPK dan/ atau Inspektorat
--	--	--	--	--------------------------------

22. DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

NO.	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1.	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sub sektor tanaman pangan dan hortikultura	PDRB per Kapita ADHB sub sektor tanaman pangan dan hortikultura (Rp.juta)	$\frac{\text{PDRB ADHB Subsektor Tanaman Pangan tahun n}}{\text{Jumlah Penduduk th n}} \times 100\%$	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikulktura/ BPS
	1.1 Meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman pangan dan Hortikultura	% Peningkatan produksi komoditas Tanaman Pangan dan Hortikultura	$\frac{\text{Total Produksi th n (ton)} - \text{total produksi th n-1 (ton)}}{\text{Total produksi tahun n-1}} \times 100\%$	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikulktura
2.	Meningkatkan akuntabilitas kinerja DTPH	Level Maturitas SPIP DTPH	Hasil Penilaian BPKP/ Inspektorat	BPKP/ Inspektorat
		Nilai SAKIP DTPH	Nilai berdasarkan LHE SAKIP OPD oleh Inspektorat	Inspektorat
	2.1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja DTPH	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Hasil perhitungan survey	OPD/ Bagian Organisasi
		Level Maturitas SPIP DTPH	Hasil Penilaian BPKP/ Inspektorat	BPKP/ Inspektorat
		Nilai SAKIP DTPH	Nilai berdasarkan LHE SAKIP OPD oleh Inspektorat	Inspektorat
		Persentase Penurunan Temuan BPK	Jumlah Temuan BPK dan/atau Inspektorat Tahun n - Jumlah temuan BPK dan/ atau Inspektorat tahun n-1 -----x 100% Jumlah temuan BPK dan/ atau Inspektorat Th n-1	OPD/ BPK dan/ atau Inspektorat

23. DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN

NO.	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1.	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Perkebunan	Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perkebunan (%)	$\frac{\text{PDRB ADHK sub-sektor perkebunan th n} - \text{PDRB ADHK sub-sektor perkebunan tahun n-1}}{\text{PDRB ADHK sub-sektor perkebunan tahun n-1}} \times 100\%$	Dinas Perkebunan dan Peternakan/ BPS

	1.1 Meningkatnya produksi komoditi perkebunan	% peningkatan produksi komoditi perkebunan	$\frac{\text{Produksi Perkebunan th n} - \text{Produksi perkebunan th n-1}}{\text{Produksi komoditi perkebunan tahun n-1}} \times 100\%$	Dinas Perkebunan dan Peternakan
2.	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Peternakan	Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Peternakan (%)	$\frac{\text{PDRB ADHK sub-sektor Peternakan th n} - \text{PDRB ADHK sub-sektor Peternakan tahun n-1}}{\text{PDRB ADHK sub-sektor Peternakan tahun n-1}} \times 100\%$	Dinas Perkebunan dan Peternakan/ BPS
	2.1 Meningkatnya populasi ternak	Peningkatan populasi komoditas ternak (%)	$\frac{\text{Populasi ternak th n (ekor)} - \text{Populasi Ternak th n-1 (ekor)}}{\text{Populasi ternak th n-1 (ekor)}} \times 100\%$	Dinas Perkebunan dan Peternakan
3.	Meningkatkan Akuntabilitas Dinas Perkebunan dan Peternakan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil perhitungan survey	OPD/ Bagian Organisasi
		Level Maturitas SPIP Dinas Perkebunan dan Peternakan	Hasil Penilaian BPKP/ Inspektorat	BPKP/ Inspektorat
		Nilai SAKIP Dinas Perkebunan dan Peternakan	Nilai berdasarkan LHE SAKIP OPD oleh Inspektorat	Inspektorat
	3.2 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perkebunan dan Peternakan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil perhitungan survey	OPD/ Bagian Organisasi
		Level Maturitas SPIP Dinas Perkebunan dan Peternakan	Hasil Penilaian BPKP/ Inspektorat	BPKP/ Inspektorat
		Nilai SAKIP Dinas Perkebunan dan Peternakan	Nilai berdasarkan LHE SAKIP OPD oleh Inspektorat	Inspektorat
		Persentase Penurunan Temuan BPK dan atau Inspektorat	$\frac{\text{Jumlah Temuan BPK dan/ atau Inspektorat Tahun n} - \text{Jumlah temuan BPK dan/ atau Inspektorat tahun n-1}}{\text{Jumlah temuan BPK dan/ atau Inspektorat Th n-1}} \times 100\%$	OPD/ BPK dan/ atau Inspektorat

24. SEKRETARIAT DAERAH

NO.	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1.	Meningkatkan Tata Kelola Kinerja Pemerintah Daerah	Indeks Pelayanan Publik	Nilai Indeks, sesuai Permen PAN & RB No.17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	Sekretariat Daerah/ Kemen-PAN-RB
	1.1 Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)	Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sesuai PP No. 13 Tahun 2019	Sekretariat Daerah/ BPKP/ Kemendagri

		Persentase Rumusan Kebijakan Bidang Kesra Yang diimplementasikan	$\frac{\text{Jumlah Kebijakan Kesra Yang Diimplementasikan}}{\text{Jumlah Kebijakan Kesra yang Dihasilkan}} \times 100\%$	Sekretariat Daerah
	1.2 Meningkatkan Fungsi Koordinasi Pembangunan Daerah	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa	Nilai yang dikeluarkan oleh Lembaga Pemerintah Non Kementerian Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)	Sekretariat Daerah/ Kemen-PAN-RB/ LKPP
		Persentase Rumusan Kebijakan Ekonomi yang diimplementasikan	$\frac{\text{Jumlah Kebijakan Ekonomi Yang Diimplementasikan}}{\text{Jumlah Kebijakan Ekonomi yang Dihasilkan}} \times 100\%$	Sekretariat Daerah
		Persentase rumusan kebijakan Pembangunan yang diimplementasikan	$\frac{\text{Jumlah Kebijakan Pembangunan Yang Diimplementasikan}}{\text{Jumlah Kebijakan Pembangunan yang Dihasilkan}} \times 100\%$	Sekretariat Daerah
2.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah	Level Maturitas SPIP	Hasil Penilaian BPKP/ Inspektorat	BPKP/ Inspektorat
		Nilai SAKIP SETDA	Nilai berdasarkan LHE SAKIP OPD oleh Inspektorat	Inspektorat
	2.1 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Hasil perhitungan survey	OPD/ Bagian Organisasi
		Level Maturitas SPIP	Hasil Penilaian BPKP/ Inspektorat	BPKP/ Inspektorat
		Nilai SAKIP SETDA	Nilai berdasarkan LHE SAKIP OPD oleh Inspektorat	Inspektorat
		Persentase Penurunan Temuan Pemeriksaan BPK dan atau Inspektorat	$\frac{\text{Jumlah Temuan BPK dan/atau Inspektorat Tahun n} - \text{Jumlah temuan BPK dan/ atau Inspektorat tahun n-1}}{\text{Jumlah temuan BPK dan/ atau Inspektorat Th n-1}} \times 100\%$	OPD/ BPK dan/ atau Inspektorat

25. SEKRETARIAT DPRD

NO.	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1.	Meningkatkan peran sekretariat DPRD dalam memfasilitasi fungsi DPRD	Persentase Penetapan Perda	$\frac{\text{Jumlah Perda Yang Ditetapkan DPRD pada Tahun n}}{\text{Jumlah Ranperda Yang Diusulkan pada Propemperda}} \times 100\%$	Sekretariat DPRD/ Bag. Hukum
	1.1 Meningkatkan Pelayanan Sekretariat DPRD dalam Memfasilitasi Fungsi DPRD	Persentase Pembahasan Dokumen Penganggaran tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Dokumen Penganggaran Yang Dibahas Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Target Dokumen Penganggaran}} \times 100\%$	Sekretariat DPRD
2.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD	Level Maturitas SPIP SETWAN	Hasil Penilaian BPKP/ Inspektorat	BPKP/ Inspektorat
		Nilai Sakip SETWAN	Nilai berdasarkan LHE SAKIP OPD oleh Inspektorat	Inspektorat
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil perhitungan survey	OPD/ Bagian Organisasi

	2.1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pasaman Barat	Level Maturitas SPIP SETWAN	Hasil Penilaian BPKP/ Inspektorat	BPKP/ Inspektorat
		Peningkatan Nilai SAKIP SETWAN	Nilai berdasarkan LHE SAKIP OPD oleh Inspektorat	Inspektorat
		Persentase Layanan Administrasi Sekretariat DPRD Terfasilitasi	$\frac{\text{Layanan Admininistrasi Set.DRPD Yang ter Fasilitasi}}{\text{Target Layanan Adm.Se.DPRD}} \times 100\%$	Sekretariat DPRD
		Persentase Penurunan Jumlah Temuan BPK dan/atau inspektorat	$\frac{\text{Jumlah Temuan BPK dan/atau Inspektorat Tahun n} - \text{Jumlah temuan BPK dan/ atau Inspektorat tahun n-1}}{\text{Jumlah temuan BPK dan/ atau Inspektorat Th n-1}} \times 100\%$	OPD/ BPK dan/ atau Inspektorat

26. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

NO.	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1.	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah	Indeks Kualitas Perencanaan	Indeks Kualitas Perencanaan = Dimensi penilaian terhadap proses 30% + Dimensi dokumen 40% + Dimensi hasil 30%	Bappelitbangda
	1.3 Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah	Persentase capaian IKU daerah	$\frac{\text{Jumlah Target Kinerja IKU Daerah Yang Tercapai}}{\text{Jumlah Target Kinerja pada IKU Daerah}} \times 100\%$	Bappelitbangda/ Bagian Organisasi / Bagian Pemerintahan Setda
		Persentase pencapaian nilai komponen perencanaan pada penilaian SAKIP	$\frac{\text{Nilai komponen perencanaan hasil evaluasi SAKIP Pemerintah Daerah oleh Kementerian PAN-RB}}{\text{Nilai Komponen Tertinggi}} \times 100\%$	Inspektorat/ Kemen-PAN-RB
		Persentase tingkat keselarasan dokumen jangka menengah daerah dan tahunan daerah dengan dokumen perencanaan Perangkat Daerah	$\frac{\text{Jumlah OPD dengan Nilai Perencanaan Baik}}{\text{Jumlah Seluruh OPD}} \times 100\%$	Bappelitbangda
2.	Meningkatkan implementasi kelitbangan dan inovasi daerah	Indeks Inovasi Daerah	Nilai Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Pasaman Barat	Keputusan Menteri Dalam Negeri
	2.1 Meningkatnya peran kelitbangan dan inovasi dalam pembangunan	Kategori capaian <i>Innovation Government Award</i> (IGA)	Kategori daerah pada penilaian dan validasi indeks inovasi daerah oleh Kementerian Dalam Negeri	Keputusan Menteri Dalam Negeri
		Persentase implementasi kelitbangan	$\frac{\text{Jumlah kajian kelitbangan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah kajian kelitbangan dalam Renja PD}} \times 100\%$	Bappelitbangda

3.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Bappelitbangda	Level Maturitas SPIP Bappelitbangda	Hasil Penilaian BPKP/ Inspektorat	BPKP/ Inspektorat
		Nilai SAKIP Bappelitbangda	Nilai berdasarkan LHE SAKIP OPD oleh Inspektorat	Inspektorat
	3.1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bappelitbangda	Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil perhitungan survey	OPD/ Bagian Organisasi
		Level Maturitas SPIP Bappelitbangda	Hasil Penilaian BPKP/ Inspektorat	BPKP/ Inspektorat
		Nilai SAKIP Bappelitbangda	Nilai berdasarkan LHE SAKIP OPD oleh Inspektorat	Inspektorat
		Persentase penurunan jumlah temuan BPK dan/atau Inspektorat	Jumlah Temuan BPK dan/atau Inspektorat Tahun n - Jumlah temuan BPK dan/ atau Inspektorat tahun n-1 -----x 100% Jumlah temuan BPK dan/ atau Inspektorat Th n-1	OPD/ BPK dan/ atau Inspektorat

27. BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO.	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1.	Mewujudkan Pengelolaan Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah Yang Akuntabel, Efektif dan Efisien	Opini BPK Atas Laporan Keuangan Daerah	Opini BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	BPK
	1.1 Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	Deviasi Realisasi Belanja terhadap Belanja Total dalam APBD	Nilai absolut dari Total belanja dalam realisasi ----- X 100% total belanja APBD dikurangi satu	BKAD
		Persetujuan bersama Rancangan Perda tentang APBD tepat waktu/Paling lam 1 (satu) bulan sebelum Tahun Anggaran dimulai	Penetapan Anggaran tahun berikutnya selambat-lambatnya 30 November pada Tahun berjalan (tercapai/tidak)	BKAD
		Rasio Anggaran Sisa terhadap Total Belanja dalam APBD tahun Sebelumnya	Nilai realisasi SiLPA ----- X 100% total belanja anggaran tahun sebelumnya	BKAD
		Rasio Belanja Pegawai Diluar Guru dan Tenaga Kesehatan	Jumlah belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan ----- x 100 % Jumlah APBD	BKAD

		Rasio Belanja Urusan pemerintahan Umum	Jumlah belanja urusan pemerintahan – transfer expenditures ----- X 100% jumlah belanja APBD	BKAD
	1.2 Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase OPD dengan penataan BMD sesuai dengan SOP	$\frac{\text{Jumlah OPD Yang Menata BMD sesuai SOP}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\%$	BKAD
2.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja BKAD	Level Maturitas SPIP BKAD	Hasil Penilaian BPKP/ Inspektorat	BPKP/ Inspektorat
		Nilai SAKIP BKAD	Nilai berdasarkan LHE SAKIP OPD oleh Inspektorat	Inspektorat
	2.1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja Satpol PP dan Kebakaran	Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil perhitungan survey	OPD/ Bagian Organisasi
		Level Maturitas SPIP BKAD	Hasil Penilaian BPKP/ Inspektorat	BPKP/ Inspektorat
		Nilai SAKIP BKAD	Nilai berdasarkan LHE SAKIP OPD oleh Inspektorat	Inspektorat
		Persentase Penurunan Temuan BPK dan atau Inspektorat BKAD	$\frac{\text{Jumlah Temuan BPK dan/atau Inspektorat Tahun n} - \text{Jumlah temuan BPK dan/ atau Inspektorat tahun n-1}}{\text{Jumlah temuan BPK dan/ atau Inspektorat Th n-1}} \times 100\%$	OPD/ BPK dan/ atau Inspektorat

28. BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO.	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1.	Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Jumlah PAD dibagi Jumlah Pendapatan Daerah dikali 100%	Bapenda
	1.1 Meningkatnya Tata Kelola Pendapatan Daerah	Deviasi Realisasi PAD Terhadap Anggaran PAD dalam APBD	Nilai absolut dari Total PAD dalam realisasi ----- X 100% dibagi total PAD dalam APBD dikurangi satu	
		Persentase Realisasi PAD	Total Realisasi PAD/Target X 100%	Bapenda
		Rasio PAD	Jumlah PAD ----- X 100% Jumlah PDRB non migas	
2.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah	Level Maturitas SPIP	Hasil Penilaian BPKP/ Inspektorat	BPKP/ Inspektorat
		Nilai SAKIP	Nilai berdasarkan LHE SAKIP OPD oleh Inspektorat	Inspektorat

	2.1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil perhitungan survey	OPD/ Bagian Organisasi
		Persentase Penurunan Temuan BPK dan atau Inspektorat	$\frac{\text{Jumlah Temuan BPK dan/atau Inspektorat Tahun } n - \text{Jumlah temuan BPK dan/ atau Inspektorat tahun } n-1}{\text{Jumlah temuan BPK dan/ atau Inspektorat Th } n-1} \times 100\%$	OPD/ BPK dan/ atau Inspektorat

29. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO.	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1.	Meningkatkan tata kelola Aparatur Sipil Negara yang profesional	Indeks Sistem Merit	Nilai Indeks penerapan Sistem Merit	BKPSDM/ Kemen-PAN-RB
	1.1 Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap Aparatur Sipil Negara	Indeks Kepuasan Masyarakat (Pegawai)	Nilai Indeks	BKPSDM
		Indeks Profesionalitas ASN	Nilai Indeks, sesuai hasil evaluasi penerapan RB	BKPSDM/ Kemen-PAN-RB
2.	Meningkatkan kualitas dan kapabilitas sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah	Aparatur Sipil Negara yang profesional	Nilai ASN yang profesional, sesuai hasil evaluasi penerapan RB	BKPSDM / BKN/ Kemen-PAN-RB
	2.1 Meningkatnya kompetensi Aparatur Sipil Negara	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi bagi bagi pimpinan daerah jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional, kepemimpinan dan prajabatan	ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi bagi bagi pimpinan daerah jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional, kepemimpinan dan prajabatan $\frac{\text{Jumlah Pejabat Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, dan Prajabatan}}{\text{Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan PT Ke Atas}} \times 100\%$	BKPSDM
		Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/ Dasar (%) (tidak termasuk guru dan Tenaga Kesehatan)	$\frac{\text{Jumlah Pegawai dengan Pendidikan SMA ke Bawah}}{\text{Jumlah Pegawai}} \times 100\%$	BKPSDM
		Rasio Pegawai Fungsional (%) (PNS tidak Termasuk guru dan tenaga Kesehatan)	$\frac{\text{Jumlah Pegawai Fungsional (di luar guru dan tenaga kesehatan)}}{\text{Jumlah Seluruh Pegawai (di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan)}} \times 100\%$	BKPSDM
3.	Meningkatkan akuntabilitas kinerja BKPSDM	Level Maturitas SPIP	Hasil Penilaian BPKP/ Inspektorat	BPKP/ Inspektorat
		Nilai SAKIP	Nilai berdasarkan LHE SAKIP OPD oleh Inspektorat	Inspektorat
		Level Maturitas SPIP	Hasil Penilaian BPKP/ Inspektorat	BPKP/ Inspektorat

	3.1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja BKPSDM	Nilai SAKIP	Nilai berdasarkan LHE SAKIP OPD oleh Inspektorat	Inspektorat
		Persentase penurunan temuan BPK dan/atau Inspektorat	$\frac{\text{Jumlah Temuan BPK dan/atau Inspektorat Tahun } n - \text{Jumlah temuan BPK dan/ atau Inspektorat tahun } n-1}{\text{Jumlah temuan BPK dan/ atau Inspektorat Th } n-1} \times 100\%$	OPD/ BPK dan/ atau Inspektorat

30. INSPEKTORAT

NO.	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1.	Meningkatkan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Level Maturitas SPIP	Hasil Penilaian BPKP	BPKP
		Tingkat Kapabilitas APIP	Tingkat Kualitas APIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	BPKP
	1.1 Meningkatnya Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah OPD Yang Ditetapkan Sebagai Zona Integritas	$\frac{\text{Jumlah OPD Yang Dicanangkan sebagai ZI}}{\text{Jumlah Seluruh OPD}} \times 100\%$	Inspektorat
		OPD dengan Nilai SPIP Minimal 3	Jumlah OPD yang memperoleh Nilai SPIP Level 3	Inspektorat
		OPD dengan Nilai SAKIP Minimal B	Jumlah OPD yang memperoleh Nilai SAKIP B	Inspektorat
		Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Pengawasan	$\frac{\text{Jumlah Temuan Yang Telah Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Seluruh Temuan}} \times 100\%$	Inspektorat
2.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat	Nilai SAKIP Inspektorat	Nilai berdasarkan LHE SAKIP Inspektorat	Inspektorat
		Level Maturitas SPIP Inspektorat	Hasil Penilaian BPKP/ Inspektorat	BPKP/ Inspektorat
	2.1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Inspektorat	Nilai SAKIP Inspektorat	Nilai berdasarkan LHE SAKIP Inspektorat	Inspektorat
		Level Maturitas SPIP Inspektorat	Hasil Penilaian BPKP/ Inspektorat	BPKP/ Inspektorat
		Persentase Penurunan Temuan BPK dan atau Inspektorat	$\frac{\text{Jumlah Temuan BPK dan/atau Inspektorat Tahun } n - \text{Jumlah temuan BPK dan/ atau Inspektorat tahun } n-1}{\text{Jumlah temuan BPK dan/ atau Inspektorat Th } n-1} \times 100\%$	OPD/ BPK dan/ atau Inspektorat
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil perhitungan survey	OPD/ Bagian Organisasi

31. KECAMATAN KINALI

NO.	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publlik Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Hasil perhitungan survey	Kecamatan/ Bagian Organisasi
	1.1 Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil perhitungan survey	Kecamatan/ Bagian Organisasi
2.	Meningkatkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	$\frac{\text{Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan}}{\text{Jumlah Target Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum}} \times 100\%$	Kecamatan Kinali
	2.1 Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	$\frac{\text{Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan}}{\text{Jumlah Target Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum}} \times 100\%$	Kecamatan Kinali
3.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan yang Baik dan Bersih	Nilai SAKIP Kecamatan	Nilai berdasarkan LHE SAKIP Kecamatan	Inspektorat
	3.1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan	Persentase penurunan temuan pemeriksaan inspektorat dan BPK	$\frac{\text{Jumlah Temuan BPK dan/ atau Inspektorat Tahun n} - \text{Jumlah temuan BPK dan/ atau Inspektorat tahun n-1}}{\text{Jumlah temuan BPK dan/ atau Inspektorat Th n-1}} \times 100\%$	Kecamatan/ BPK dan/ atau Inspektorat

32. KECAMATAN SASAK RANAH PASISIE

NO.	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publlik Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Hasil perhitungan survey	Kecamatan/ Bagian Organisasi
	1.1 Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil perhitungan survey	Kecamatan/ Bagian Organisasi

2.	Meningkatkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	$\frac{\text{Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan}}{\text{Jumlah Target Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum}} \times 100\%$	Kecamatan Sasak Ranah Pasisie
	2.1 Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	$\frac{\text{Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan}}{\text{Jumlah Target Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum}} \times 100\%$	Kecamatan Sasak Ranah Pasisie
3.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan yang Baik dan Bersih	Nilai SAKIP OPD	Nilai berdasarkan LHE SAKIP Kecamatan	Inspektorat
	3.1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan	Persentase penurunan temuan pemeriksaan inspektorat dan BPK	$\frac{\text{Jumlah Temuan BPK dan/atau Inspektorat Tahun n} - \text{Jumlah temuan BPK dan/ atau Inspektorat tahun n-1}}{\text{Jumlah temuan BPK dan/ atau Inspektorat Th n-1}} \times 100\%$	Kecamatan/ BPK dan/ atau Inspektorat

33. KECAMATAN TALAMAU

NO.	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publlik Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Hasil perhitungan survey	Kecamatan/ Bagian Organisasi
	1.1 Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil perhitungan survey	Kecamatan/ Bagian Organisasi
2.	Meningkatkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	$\frac{\text{Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan}}{\text{Jumlah Target Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum}} \times 100\%$	Kecamatan Talamau
	2.1 Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	$\frac{\text{Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan}}{\text{Jumlah Target Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum}} \times 100\%$	Kecamatan Talamau
3.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan yang Baik dan Bersih	Nilai SAKIP OPD	Nilai berdasarkan LHE SAKIP Kecamatan	Inspektorat

	3.1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan Talamau	Persentase penurunan temuan pemeriksaan inspektorat dan BPK	Jumlah Temuan BPK dan/atau Inspektorat Tahun n - Jumlah temuan BPK dan/ atau Inspektorat tahun n-1 -----x 100% Jumlah temuan BPK dan/ atau Inspektorat Th n-1	Kecamatan/ BPK dan/ atau Inspektorat
--	--	---	--	--------------------------------------

34. KECAMATAN PASAMAN

NO.	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publiik Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Hasil perhitungan survey	Kecamatan/ Bagian Organisasi
	1.1 Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil perhitungan survey	Kecamatan/ Bagian Organisasi
2.	Meningkatkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum	$\frac{\text{Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan}}{\text{Jumlah Target Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum}} \times 100\%$	Kecamatan Pasaman
	1.2 Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	$\frac{\text{Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan}}{\text{Jumlah Target Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum}} \times 100\%$	Kecamatan Pasaman
3.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan yang Baik dan Bersih	Nilai Sakip OPD	Nilai berdasarkan LHE SAKIP Kecamatan	Inspektorat
	3.1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan	Persentase penurunan temuan pemeriksaan inspektorat dan BPK	Jumlah Temuan BPK dan/atau Inspektorat Tahun n - Jumlah temuan BPK dan/ atau Inspektorat tahun n-1 -----x 100% Jumlah temuan BPK dan/ atau Inspektorat Th n-1	Kecamatan/ BPK dan/ atau Inspektorat

35. KECAMATAN GUNUNG TULEH

NO.	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Hasil perhitungan survey	Kecamatan/ Bagian Organisasi
	1.1 Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil perhitungan survey	Kecamatan/ Bagian Organisasi
2.	Meningkatkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	$\frac{\text{Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan}}{\text{Jumlah Target Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum}} \times 100\%$	Kecamatan Gunung Tuleh
	1.2 Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	$\frac{\text{Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan}}{\text{Jumlah Target Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum}} \times 100\%$	Kecamatan Gunung Tuleh
3.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan yang Baik dan Bersih	Nilai SAKIP Kecamatan	Nilai berdasarkan LHE SAKIP Kecamatan	Inspektorat
		Persentase penurunan temuan pemeriksaan Inspektorat dan BPK	$\frac{\text{Jumlah Temuan BPK dan/atau Inspektorat Tahun } n - \text{Jumlah temuan BPK dan/ atau Inspektorat tahun } n-1}{\text{Jumlah temuan BPK dan/ atau Inspektorat Th } n-1} \times 100\%$	Kecamatan/ BPK dan/ atau Inspektorat
	3.1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	Nilai berdasarkan LHE SAKIP Kecamatan	Inspektorat
		Persentase penurunan temuan pemeriksaan inspektorat dan BPK	$\frac{\text{Jumlah Temuan BPK dan/atau Inspektorat Tahun } n - \text{Jumlah temuan BPK dan/ atau Inspektorat tahun } n-1}{\text{Jumlah temuan BPK dan/ atau Inspektorat Th } n-1} \times 100\%$	Kecamatan/ BPK dan/ atau Inspektorat

36. KECAMATAN LEMBAH MELINTANG

NO.	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Hasil perhitungan survey	Kecamatan/ Bagian Organisasi
	1.1 Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap	Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil perhitungan survey	Kecamatan/ Bagian Organisasi

	kualitas pelayanan kecamatan			
2.	Meningkatkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	$\frac{\text{Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan}}{\text{Jumlah Target Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum}} \times 100\%$	Kecamatan Lembah Melintang
	2.1 Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	$\frac{\text{Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan}}{\text{Jumlah Target Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum}} \times 100\%$	Kecamatan Lembah Melintang
3.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan yang Baik dan Bersih	Nilai SAKIP Kecamatan	Nilai berdasarkan LHE SAKIP Kecamatan	Inspektorat
		Persentase Temuan Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah Temuan Pemeriksaan Yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Temuan Pemeriksaan}} \times 100\%$	BPK dan/ atau Inspektorat
	3.1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	Nilai berdasarkan LHE SAKIP Kecamatan	Inspektorat
		Persentase Temuan Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah Temuan Pemeriksaan Yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Temuan Pemeriksaan}} \times 100\%$	Kecamatan/ BPK dan/ atau Inspektorat

37. KECAMATAN RANAH BATAHAN

NO.	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Hasil perhitungan survey	Kecamatan/ Bagian Organisasi
	1.1 Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil perhitungan survey	Kecamatan/ Bagian Organisasi
2.	Meningkatkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	$\frac{\text{Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan}}{\text{Jumlah Target Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum}} \times 100\%$	Kecamatan Ranah Batahan
	2.1 Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum	$\frac{\text{Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan}}{\text{Jumlah Target Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum}} \times 100\%$	Kecamatan Ranah Batahan

3.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan yang Baik dan Bersih	Nilai SAKIP Kecamatan	Nilai berdasarkan LHE SAKIP Kecamatan	Inspektorat
		Persentase penurunan temuan pemeriksaan inspektorat dan BPK	Jumlah Temuan BPK dan/atau Inspektorat Tahun n - Jumlah temuan BPK dan/ atau Inspektorat tahun n-1 -----x 100% Jumlah temuan BPK dan/ atau Inspektorat Th n-1	Kecamatan/ BPK dan/ atau Inspektorat
	3.1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan	Nilai SAKIP	Nilai berdasarkan LHE SAKIP Kecamatan	Inspektorat
		Persentase penurunan temuan pemeriksaan inspektorat dan BPK	Jumlah Temuan BPK dan/atau Inspektorat Tahun n - Jumlah temuan BPK dan/ atau Inspektorat tahun n-1 -----x 100% Jumlah temuan BPK dan/ atau Inspektorat Th n-1	Kecamatan/ BPK dan/ atau Inspektorat

38. KECAMATAN SUNGAI BEREMAS

NO.	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Hasil perhitungan survey	Kecamatan/ Bagian Organisasi
	1.1 Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil perhitungan survey	Kecamatan/ Bagian Organisasi
2.	Meningkatkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	$\frac{\text{Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan}}{\text{Jumlah Target Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum}} \times 100\%$	Kecamatan Sungai Beremas
	2.1 Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	$\frac{\text{Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan}}{\text{Jumlah Target Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum}} \times 100\%$	Kecamatan Sungai Beremas
3.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan yang Baik dan Bersih	Nilai Sakip Kecamatan	Nilai berdasarkan LHE SAKIP Kecamatan	Inspektorat
	3.1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan	Persentase penurunan temuan pemeriksaan inspektorat dan BPK	Jumlah Temuan BPK dan/atau Inspektorat Tahun n - Jumlah temuan BPK dan/ atau Inspektorat tahun n-1 -----x 100% Jumlah temuan BPK dan/ atau Inspektorat Th n-1	Kecamatan/ BPK dan/ atau Inspektorat

39. KECAMATAN SUNGAI AUR

NO.	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Hasil perhitungan survey	Kecamatan/ Bagian Organisasi
	1.1 Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil perhitungan survey	Kecamatan/ Bagian Organisasi
2.	Meningkatkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	$\frac{\text{Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan}}{\text{Jumlah Target Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum}} \times 100\%$	Kecamatan Sungai Aur
	2.1 Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	$\frac{\text{Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan}}{\text{Jumlah Target Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum}} \times 100\%$	Kecamatan Sungai Aur
3.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan yang Baik dan Bersih	Nilai SAKIP	Nilai berdasarkan LHE SAKIP Kecamatan	Inspektorat
	3.1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan	Persentase penurunan temuan pemeriksaan inspektorat dan BPK	$\frac{\text{Jumlah Temuan BPK dan/atau Inspektorat Tahun n} - \text{Jumlah temuan BPK dan/ atau Inspektorat tahun n-1}}{\text{Jumlah temuan BPK dan/ atau Inspektorat Th n-1}} \times 100\%$	Kecamatan/ BPK dan/ atau Inspektorat

40. KECAMATAN LUHAK NAN DUO

NO.	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Hasil perhitungan survey	Kecamatan/ Bagian Organisasi
	1.1 Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil perhitungan survey	Kecamatan/ Bagian Organisasi

2.	Meningkatkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	$\frac{\text{Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan}}{\text{Jumlah Target Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum}} \times 100\%$	Kecamatan Luhak Nan Duo
	1.2 Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	$\frac{\text{Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan}}{\text{Jumlah Target Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum}} \times 100\%$	Kecamatan Luhak Nan Duo
3.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan yang Baik dan Bersih	Nilai Maturitas SPIP	Hasil Penilaian BPKP/ Inspektorat	BPKP/ Inspektorat
		Nilai Sakip Kecamatan	Nilai berdasarkan LHE SAKIP Kecamatan	Inspektorat
		Persentase penurunan temuan pemeriksaan inspektorat dan BPK	$\frac{\text{Jumlah Temuan BPK dan/ atau Inspektorat Tahun n - Jumlah temuan BPK dan/ atau Inspektorat tahun n-1}}{\text{Jumlah temuan BPK dan/ atau Inspektorat Th n-1}} \times 100\%$	Kecamatan/ BPK dan/ atau Inspektorat
	3.1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan	Nilai Maturitas SPIP	Hasil Penilaian BPKP/ Inspektorat	BPKP/ Inspektorat
		Nilai Sakip Kecamatan	Nilai berdasarkan LHE SAKIP Kecamatan	Inspektorat
		Persentase penurunan temuan pemeriksaan inspektorat dan BPK	$\frac{\text{Jumlah Temuan BPK dan/ atau Inspektorat Tahun n - Jumlah temuan BPK dan/ atau Inspektorat tahun n-1}}{\text{Jumlah temuan BPK dan/ atau Inspektorat Th n-1}} \times 100\%$	Kecamatan/ BPK dan/ atau Inspektorat

41. KECAMATAN KOTO BALINGKA

NO.	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publiik Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Hasil perhitungan survey	Kecamatan/ Bagian Organisasi
	1.1 Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil perhitungan survey	Kecamatan/ Bagian Organisasi
2.	Meningkatkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	$\frac{\text{Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan}}{\text{Jumlah Target Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum}} \times 100\%$	Kecamatan Koto Balingka

	2.1 Meningkatkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	$\frac{\text{Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan}}{\text{Jumlah Target Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum}} \times 100\%$	Kecamatan Koto Balingka
3.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan yang Baik dan Bersih	Nilai Sakip OPD	Nilai berdasarkan LHE SAKIP Kecamatan	Inspektorat
	3.1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan	Persentase penurunan temuan pemeriksaan inspektorat dan BPK	$\frac{\text{Jumlah Temuan BPK dan/atau Inspektorat Tahun } n - \text{Jumlah temuan BPK dan/ atau Inspektorat tahun } n-1}{\text{Jumlah temuan BPK dan/ atau Inspektorat Th } n-1} \times 100\%$	Kecamatan/ BPK dan/ atau Inspektorat

42. BADAN KESBANGPOL

NO.	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1.	Menciptakan masyarakat yang aman dan tentram	Penurunan konflik SARA konflik sosial ekonomi	Konflik SARA konflik sosial ekonomi tahun n - konflik SARA konflik sosial ekonomi tahun n-1 $\frac{\text{Jumlah Konflik SARA yang Tertangani pada th } n}{\text{Jumlah Konflik Yang terjadi pada th } n} \times 100\%$	Badan Kesbangpol
	1.1 Terciptanya Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Persentase konflik sosial yang ditangani	$\frac{\text{Jumlah Konflik SARA yang Tertangani pada th } n}{\text{Jumlah Konflik Yang terjadi pada th } n} \times 100\%$	Badan Kesbangpol
		Persentase masyarakat yang paham tentang wawasan kebangsaan	$\frac{\text{Jumlah Penduduk Sasaran Yang Paham tentang Wawasan Kebangsaan}}{\text{Jumlah Penduduk Sasaran}} \times 100\%$	Badan Kesbangpol
		Persentase Ormas terdaftar dan aktif dalam pembangunan	$\frac{\text{Jumlah Ormas Terdaftar dan Aktif Dalam Pembangunan}}{\text{Jumlah Ormas Terdaftar}} \times 100\%$	Badan Kesbangpol
	2.1 Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang kehidupan berpolitik	Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu	Penduduk yang sudah mempunyai hak pilih yang berpartisipasi dalam Pemilu $\frac{\text{Penduduk yang sudah mempunyai hak pilih}}{\text{Penduduk yang sudah mempunyai hak pilih}} \times 100\%$	Badan Kesbangpol
2.	Meningkatkan akuntabilitas Kinerja Kesbangpol	Level Maturitas SPIP Kesbangpol	Hasil Penilaian BPKP/ Inspektorat	BPKP/ Inspektorat
		Nilai SAKIP Kesbangpol	Nilai LHE SAKIP OPD Oleh Inspektorat	Inspektorat
	3.1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kesbangpol	Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil perhitungan survey	OPD/ Bagian Organisasi
		Level Maturitas SPIP Kesbangpol	Hasil Penilaian BPKP/ Inspektorat	BPKP/ Inspektorat

		Nilai SAKIP Kesbangpol	Nilai LHE SAKIP OPD Oleh Inspektorat	Inspektorat
		Persentase penurunan jumlah temuan BPK atas laporan Keuangan Kesbangpol	Jumlah Temuan BPK dan/atau Inspektorat Tahun n - Jumlah temuan BPK dan/ atau Inspektorat tahun n-1 -----x 100% Jumlah temuan BPK dan/ atau Inspektorat Th n-1	OPD / BPK dan/ atau Inspektorat



BUPATI PASAMAN BARAT



HAMSUARDI